

SINERGI KULTURAL INDONESIA

Oleh Radhar Panca Dahana

Berbagai peristiwa yang terjadi di tahun-tahun akhir masa kekuasaan dua periode presiden SBY, menunjukkan kepada kita bagaimana para elit kita –terutama—tidak mengalami perkembangan mental sebagaimana secara fisik pertumbuhannya diperjuangkan oleh pemerintah. Demokrasi yang menjadi pilihan sistemik bahkan ideologis dari pemerintah dan elit kita, justru berkali-kali dihina dan dikhianati oleh mereka sendiri. Juga kapitalisme (pasar) juga dilecehkan dan dimanipulasi untuk menghisap harta rakyat demi kebutuhan pribadi mereka, elit dan para pejabat publik.

Semua gambaran perilaku elit itu dengan gamblang memperlihatkan, betapa sistem-sistem yang dipilih bangsa ini (elit secara khusus, sebenarnya) sebagai dasar hidup bernegara, berpolitik, ber hukum atau berekonomi sebenarnya problematic. Bukan saja ia mengalami benturan dahsyat dan fundamental dengan realitas tradisional dan primordial bangsa kita, lebih dari itu, semua sistem itu sendiri ternyata memiliki kemampuan yang rendah hanya untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi –justru—di dalam dirinya sendiri. Sistem-sistem itu rapuh dan rentan.

Lebih spesifik, sebenarnya semua system itu menyimpan semacam paradoks di dalam tubuh rasional atau logikanya sendiri. Yakni, paradoks yang terjadi saat idea yang mendekam dalam semua sistem (ideologis) itu menyentuh ranah praktis; mendapatkan wujudnya dalam (perilaku/diri) manusia. Sebuah kenyataan yang boleh jadi dimulai oleh fitrah manusia yang memang paradoksal. Sebagai makhluk, manusia adalah sebuah idea(l) yang luar biasa –terlebih jika mengimaninya sebagai “the creature of God”—tapi pada saat yang bersamaan manusia juga pengkhianat dan perusak idea(l) itu karena ada tabiat kodratinya yang *jaiz*.

Tabiat itu adalah produk dari kapasitas dasar manusia dalam berpikir dan berkehendak, yang memungkinkannya menimbang, memilih bahkan ragu. Sehingga membuat manusia, satu kepastian natural, menjadi selalu relatif secara nurtural. Apalagi sebuah ideal macam

demokrasi. Lantaran ia sendiri adalah produk dari manusia secara nurtural, ia bukan hanya paradoksal dalam praksisnya, tapi juga dalam epistemologinya, dalam idea-idea di dalamnya sendiri. Realitas yang membuat demokrasi justru memroduksi kemustahilan justru bagi idealnya sendiri.

Realitas natural dan nurtural itu membuat para elit dan petinggi itu, seolah menjadi pandir karena buta pada praktik-praktik demokrasi yang bias bahkan deviatif yang justru dilakukan oleh negara-negara Oksidental dalam sejarah modernnya. Dan beberapa dekade belakangan, para elit lokal itu justru terus mempertebal keimanan “demokratis”-nya dengan terus memroduksi lembaga-lembaga penunjangnya, termasuk lembaga yang hampir nol fungsinya.

Tapi kini, sebagian dari mereka mulai menyadari betapa sebenarnya demokrasi tidak bekerja –sebagaimana di atas kertas teoritiknya—di dalam kehidupan dan kepentingan rakyat jelata, konstituen yang justru menjadi arah idealisasinya. Demokrasi menciptakan kekecewaan yang berulang dan kian represif di kalangan rakyat. Demokrasi tak lain telah menjadi alat kekuasaan, alat bagi kepentingan kaum elit untuk memertahankan dominasinya, bukan hanya secara politis, tapi juga ekonomis, bahkan akademis, agamis, hingga sosial dan kultural.

Korupsi, manipulasi, hingga kekerasan secara fisik, sosial dan kultural yang belakangan seperti menjadi identitas dalam hidup kita berbangsa dan bernegara, sebenarnya tidak lain dari praktik-praktik deviatif dari perilaku sistemik kita. Perilaku yang diproduksi oleh sistem-sistem bernegara dan berbangsa yang kita pilih sendiri melalui kekuasaan yang kita delegasikan secara serampangan pada segerombolan elit itu. Gerombolan yang telah dengan kasar membajak semua idea kebangsaan para pendiri kita hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi mereka.

Siklus Konflik Demokrasi

Betapapun terlalu lambat nya kesadaran itu datang, hingga praktik-praktik deviatif itu bukan lagi bersifat temporer dan kasuistik, namun telah menjadi laten bahkan meresap menjadi semacam nilai dan norma, kita harus menyambutnya secara positif. Memperlakukannya sebagai sebuah momentum untuk mendapatkan konsensus tentang

perhitungan kembali secara komprehensif dan holistik tentang pilihan-pilihan sistemik kita dalam mengatur hidup berbangsa dan bernegara. Sebuah “kampanye” yang secara personal lebih dua dekade belakangan saya kerahkan semua energi untuknya.

Dalam “kampanye” itu, saya pun termasuk menolak etos “demokratis” yang senantiasa bermain posisi untuk meneguhkan eksistensi, menetapkan orientasi hingga menjalankan aksi. Dalam logika posisional ini, lawan dan kawan menjadi hasil yang tak terelakkan, karena kita sebuah posisi ditetapkan maka o-posisi pun dengan segera terumuskan. Dan konflik pun bukan hanya menjadi konsekuensi (logis), tapi juga prakondisi. Maka siklus pun terbentuk dan berputar, berisi konflik.

Konflik harus ada untuk terjadi kesepakatan. Kesepakatan diproduksi sebagai sebuah hasil negosiasi yang keras, dimana teorinya setengah dari ide dan kepentingan kita dibagi pada pihak lain. Atau lebih parah, kelebihan satu persen, dianggap sebagai kemenangan dalam siklus konflik di atas yang memberi hak pada kita untuk mendominasi seluruh sisa persennya. *The winner takes all*. Salah satu jargon utama dari praktik siklik di atas, yang tidak lain adalah sebuah norma barbar dan primitif dalam sejarah adab manusia.

Kini kita memahami juga mengalami bagaimana pahitnya praktik demokrasi dengan siklus konflik itu. Korban berjatuh dengan cara yang menyedihkan. Apa yang lebih menggiriskan, kini bukan hanya elit tapi juga rakyat jelata tergiring untuk menginternalisasi nilai, norma, hingga watak-watak kasar, jahat, kriminal, individual, yang melawan hampir semua ide-ide kemanusiaan luhur yang pernah dihasilkan bangsa ini. Kita sebagai manusia dan bangsa, digiring untuk menjadi biadab dan barbar.

Ini bukan lagi sebuah *fallacy* atau kekeliruan peradaban, tapi ini sudah tragedi (*civilization tragedy*). Sebuah azab yang membutuhkan satu milenium mungkin untuk memperbaikinya, sebagaimana sejarah abad kegelapan (*Dark Age*) atau tragedi Sodom dan Gomora. Sebuah keadaan yang membuat semua pencapaian menakjubkan dari akal dan kebudayaan kita bukan hanya sia-sia, mencoreng dan menghina kita di hadapan anak cucu kita, dan lebih parahnya, menciptakan masa depan yang menggiriskan alih-alih masa nanti yang penuh janji.

Modal Peradaban

Karena itulah, kita harus memanfaatkan situasi ini menjadi momentum perubahan, ketika realitas sosial dan kultural –yang walaupun kritis—masih memungkinkan, akal sehat masih ada, dan potensi-potensi luar biasa justru menampakkan kualitas dahsyatnya. Bila saya melakukan ajakan ini, bukan hanya karena perhitungan akali dan intuisi belaka, bukan hanya karena ideal sederhana tentang kejayaan negeri ini, tapi juga karena berangkat dari pengalaman betapa negeri ini sebenarnya dibangun dan dipertahankan selama beberapa milenia justru kekuatan dan kapasitas-kapasitas internalnya.

Peduli dengan bayangan –yang ilusif, romantik, mitik, atau isapan jempol menurut sebagian ilmuwan—tentang kejayaan bangsa ini di masa ribuan tahun sebelum masehi, yang jelas fakta ribuan menunjukkan bahwa kita memiliki kejayaan itu juga di kurun masehi, yang sejarah global (Oksidental sebenarnya) sejak 1.500 tahun lalu tidak mau mencatatnya. Katakanlah Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan besar dari sekitar abad 7 dan abad 14 yang membuktikan pada dunia bagaimana keduanya telah mencatatkan prestasi-prestasi kebudayaan luar biasa di tingkat global.

Tahukah Anda bahwa Ratu di Sriwijaya telah mengimpor da'i-da'i pilihan di zaman sahabat dekat Nabi untuk mengajarkan Islam di kerajaan Melayu itu? Tahukan Anda bagaimana kerajaan itu membangun universitas tertua (yang sebenarnya) di dunia, mengekspor dosen-dosen ternama dan didatangi mahasiswa mancanegara? Tapi apakah dunia mencatatnya? Tergolongkah Sriwijaya dan Majapahit sebagai *the great kingdom*? Tidak. Ilmu Barat tidak mencatatnya. Bahkan pustaka Google pun tidak membariskannya di deretan kerajaan besar dunia, kalah bahkan dengan kerajaan Maya atau Thailand.

Sementara, apa yang telah dicapai dua kerajaan besar itu, lebih tepatnya apa yang sudah dicapai oleh suku-sukubangsa di nusantara ini adalah sebuah peradaban yang diisi oleh ratusan kebudayaan dari etnik-etnik (640-an menurut jumlah resmi) yang ada di dalamnya. Peradaban mandiri yang tentu saja tidak kalah kelas dibanding peradaban Sumeria, Mesir, Indus, Babylonia atau Cina yang kita kenal selama ini. Peradaban yang dibangun dengan unikum yang membuat kerajaan-kerajaan pembentuknya berbeda dengan kerajaan dan kebudayaan bangsa lain.

Sebagaimana kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya, Sriwijaya adalah negara besar, maju dan sejahtera yang dibangun tidak berdasar permainan posisional yang menyesatkan di atas. Kecuali setelah kolonialisme hadir, termasuk menghadirkan konflik karena permainan di atas,

negeri dan kerajaan di bangun berratus-ratus di kepulauan ini dalam sistem dan mekanisme hubungan yang komplementaristis, yang mutualistis, lengkap dengan norma-norma hidup kosmpolit, egaliter, a-rasialis, akulturatif, dan seterusnya; norma-norma yang justru mendahului dan mengilhami idea-idea terbaik dalam demokrasi awal di Yunani.

Dalam semangat itulah, siapa pun pihak, seluruh pemangku kepentingan di negeri sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk bekerja seoptimal mungkin untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam menemukan jati diri peradaban Indonesia kita itu. Enyah dan matilah semua kemungkinan dan kecenderungan deviatif, kriminal atau jahat dalam diri kita. Kerahkan semua energi untuk menciptakan sinergi, Sinergi Indonesia, yang – percayalah—ia akan memberi kita kekuatan dan solusi terbaik dan terhebat yang bisa dihasilkan bangsa ini, bahkan dunia.

Sejarah telah membuktikannya.

Kahda;

Dalam pemikiran di atas, kabar diterimanya ahli genetik dan pedatrisian Inggris, Stephen Opphenheimer, penulis buku *Eden in the East*, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu di Istana Negara, memberi indikasi pemerintah puncak negeri ini mulai memberi perhatian pada sebuah diskursus yang belakangan mengambil perhatian banyak kalangan: tentang eksistensi sebuah peradaban yang cukup agung atau *advanced* dalam ukuran masa kini dan tempo lalu di kawasan Nusantara, yang kemudian hari menjadi negara dan bangsa Indonesia ini.

Diskursus ini bukan saja melahirkan kelompok, komunitas, klub diskusi, buku, artikel, seminar dan mungkin puluhan ribu komentar dan tulisan di berbagai blog atau media sosial (virtual), tapi juga memunculkan semacam kepercayaan diri –hingga pada tingkat yang obsesif bahkan chauvinistik—di berbagai kalangan, terutama yang bertaut dengan (identitas) lokal tertentu. Hal ini sebenarnya bisa dianggap cukup fenomenal. Mengingat sebaran diskursus ini sudah merentang dari ujung Timur hingga Barat, Utara dan Selatan negeri ini, bahkan hingga di sebagian wilayah dunia lainnya.

Seorang kyai dari Jawa Tengah menugaskan satu tim santrinya, hanya untuk mencari rumah saya, karena ia berkeyakinan –sebagaimana ceramahnya pada para santri—bahwa

sayalah yang bisa “membuktikan” bahwa suku Jawa adalah suku tertua atau pertama di muka bumi ini. Saya tidak kenal, nama, wajah, atau domisili sang Kyai, begitupun sebaliknya. Dan ia bukan kyai pertama –dengan pondok berisi ribuan santri—yang membuat kontak dengan saya dengan membawa keyakinan: bangsa Jawa atau setidaknya di pulau Jawa ini pernah ada satu bangsa purba dengan tingkat peradaban yang tinggi di masa lalu.

Beberapa kali juga saya harus memenuhi undangan seminar, simposium atau diskusi terbatas tentang sebuah peradaban bernama “Sunda” (Sonde), yang sebagian bahkan diyakini menjadi cikal bakal semua peradaban besar dan kecil, tidak hanya di seluruh negeri ini tapi juga belahan dunia lainnya. Mereka yang terlibat dalam soal ini, bukan hanya kyai, cendekiawan, pengusaha besar, politikus, pejabat pemerintah, mahasiswa, seniman, hingga para tetua, sesepuh adat bahkan spiritualis kelas “tinggi”.

Bukan hanya ahli dan praktisi kebatinan asal Jawa, tapi juga dari pulau-pulau lain yang mengundang saya membicarakan ini. Bukan saja anak-anak muda penuh semangat keilmuan dan kebangsaan yang pepat, atau seniman-seniman pop dan top negeri ini, meyakini jargon-jargon yang walaupun spekulatif mampu menjadi alat peneguh batin bahkan pemersatu di kalangan (etnik) mereka. Entah itu tentang “papua yang merupakan asal semua seni”, “maluku sebagai negeri bahari pulang purba”, “Flores sebagai asal-asul manusia”, “Suku Daya yang lebih tua dari India”, bahkan hingga seorang budayawan Tegal meyakini fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di pinggiran kota martabak itu menandakan asal mula peradaban di Jawa bahkan Indonesia, berasal dari kota “ngapak” itu.

Sinisme Ilmuwan

Semua itu menjadi wajar pada akhirnya mengundang reaksi –sebagian sinis—dari mereka yang selama ini kita anggap sebagai ilmuwan. Mereka yang lebih memercayai data material, dalam bentuk artefak, sebagai dasar utama untuk menafsir dan menyimpulkan sesuatu. Dan data material itu netral, bersih dari hal-hal yang mistis, khayali, atau dibumbui oleh spekulasi spiritual. Sebuah posisi yang memang sangat memungkinkan mereka, para ilmuwan “sejati” –setidaknya yang terlatih dan terdidik dalam logosentrisme european—melihat semua hal yang berkait dengan “fenomen” di atas sebagai salah satu ekspresi dari pribadi yang mitikal dan mistikal. Pribadi sejati –konon—bangsa Indonesia.

Tidak ada yang keliru dengan pandangan itu. Bila kita bersetuju atau sekurangnya memahami wilayah intelektual, dalam hal ini rasionalitas yang dibangun para sarjana Eropa, lengkap dengan metodologi, epistemologi juga ontologinya masing-masing. Tafsir, kesimpulan dan data-data arkelogis juga paleontologis kita hormati sebagai dasar obyektif untuk menilai zaman, masa lalu, hingga konstitusi dari kebudayaan/peradaban serta manusia yang mengisih dan membentuknya.

Namun, hanya sebagai diskusi kecil, betapapun ilmu memberi pengaruh besar pada kehidupan manusia, termasuk perkembangan adab dan kebudayaannya, siapa pun mestinya memahami, adab dan kebudayaan itu ternyata berlangsung, berproses, hidup dan mati, jauh lebih luas semestanya ketimbang runtutan kata-kata dan proposisi yang disebut ilmiah. Sebagian besar hidup ada di luar juaan teori dan asumsi. Kata, tertulis terutama –sebagai bagian dari artefak—hanyalah sebagian, bila tidak dibilang kecil, dari perangkat atau medium yang digunakan sebuah kelompok/bangsa mengembangkan dirinya.

Dan di sini mungkin hipotesis –jika istilah ini mau digunakan—bisa kita ajukan, bahwa sebagian (suku) bangsa di dunia, terutama di negeri ini, tidak memandang tulisan sebagai medium utama dalam ia beradab dan berbudaya. Bangsa-bangsa di Nusantara mengembangkan dan memroduksi karya-karya kebudayaannya yang kini kian banyak terkuak dahsyatnya –ingat *La Galigo*—tidak melalui proses literasi semacam itu. Pengembangan dan pewarisan melalui lisan, perilaku, dan kesepakatan sosial adalah cara-cara utama itu. Kita dapat menemukannya dengan mudah di berbagai tradisi hingga karya-karya artistik di pelbagai sukubangsa negeri ini.

Model pemberadaban semacam ini tentu menciptakan kesulitan tersendiri bagi ilmu-ilmu sosial modern. Setidaknya bagi ilmu sejarah, antropologi, arkeologi atau paleontologi untuk menegaskan realitas masa lalu suku-sukubangsa itu. Sebagai contoh, sebagaimana dituturkan Zoetmoelder dalam kita babonnya, *Kalangwan*, sastra Jawa kuno sebenarnya adalah sebuah usaha melakukan transliterasi dari bahasa Jawa purba ke bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Namun ternyata usaha itu tidak seluruhnya berhasil. Cukup banyak kosakata Jawa purba yang tidak sukses ditransliterasi. Sekurangnya, profesor Zoetmoelder mencatat lebih dari 1.500 kata Jawa purba yang tak dapat dialiterasi menjadi Sanskrit dan Pallawa.

Fakta itu memperlihatkan bagaimana 1.500 lebih kata Jawa purba –sebagian masih hidup hingga hari ini—itu tidak dapat menjadi data material yang memperlihatkan bagaimana sukubangsa Jawa sudah memiliki kebudayaan literernya sendiri sebelum orang India (Arya) masuk ke pulau Jawa. Bagaimana Jawa kemudian dibentuk secara “menyimpang” lewat kultur tulisan yang dibawa para Brahmin dan pujangga India (Arya).

Keberanian Politik

Paparan di atas, tidak lain hanya semacam pra-asumsi yang menyatakan sebuah realitas di masa lalu, bahkan di masa kini, tidaklah sesederhana bukti-bukti kebudayaan yang ditinggalkannya. Peradaban Nusantara, dengan seluruh karakteristiknya yang khas, yang maritim itu (oh...betapa kata ini adalah gadis paling seksi untuk kita telusuri tubuhnya), tidaklah dapat direduksi hanya oleh data materi, teori atau sembarang epistemologi. Begitupun jati diri manusia yang dihasilkan peradaban itu tentu bukanlah jati diri arkeologis atau paleontologis.

Pertimbangan yang lebih komprehensif, setidaknya multidisipliner, harus dilakukan dengan kerja keras untuk kita bisa mendekati atau lebih mengenali jati diri itu. Saya ingin menyebut pertimbangan itu sebagai “kultural”. Pertimbangan yang melihat manusia dan adab yang diproduksinya tidak hanya bebas dari prasangka-prasangka rasional (European) tapi juga mengikutsertakan peralatan-peralatan budaya yang mereka gunakan sendiri, yang kebanyakan justru tidak material.

Seperti budaya lisan, yang tidak bisa dimaterialisir menjadi sekadar kata kemudian menjadi buku, karena di dalamnya terdapat dimensi metalingual atau paralingual (duh...istilah-istilah ini), yang turut menentukan makna dan sukses tidaknya transmisi sebuah kebudayaan. Jati diri kultural yang terbentuk dalam proses pemberadaban bangsa Nusantara inilah sesungguhnya yang ada di balik gairah besar kebangkitan “nasionalisme” baru Indonesia saat ini. Nasionalisme yang tidak diinisiasi atau diformulasi oleh teori atau gagasan-gagasan abad 19 dan 20 dalam politik ini. Nasionalisme yang jauh lebih lokal, berakar, sebutlah...*genuine*.

Dalam tatar kebangsaan, Indonesia yang kini *given*, arus keras diskursus di bagian awal tulisan, tidak peduli dengan isu-isu murahan tentang “Atlantis”, celotehan fiksional Plato

itu, memang sudah sepantasnya menjadi perhatian petinggi republik ini. Bukan sekadar sebagai kegenitan atau romantisme. Tapi sebagai usaha politik, lebih tepatnya usaha peradaban (saya kerap menggunakan kata ini...karena Nusantara dalam perhitungan saya bukan hanya melahirkan kebudayaan tapi juga sebuah peradaban, dalam perhitungan apa pun) menegakkan bangsa dan negara ini.

Dan saya tidak akan pernah berhenti mengatakan hal ini, sebagaimana sudah saya sampaikan berulang kali —termasuk—kepada SBY dan para stafnya, kepada Wapres dan sekian banyak petinggi negeri, semua itu tidak bisa tidak membutuhkan bukan sekadar *political will*, tapi lebih utama *political courageous*. Sebuah modal mental dari negarawan kita untuk berhadapan dengan dunia lewat klaim kebudayaan.

Kita tahu, di masa ini, kata terakhir itu, kebudayaan, kini berkembang menjadi mantra paling ampuh, bukan hanya untuk *survive*, berjaya, bahkan berkuasa, hingga tingkat dunia. Silakan berdiri di baris belakang nanti, bila Anda tidak memercayai.